



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2020**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat rahmat dan hidayahNya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dibuat berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dari Pembuatan Laporan ini adalah untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2020. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemui hambatan dan kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan menjadi suatu halangan akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan perbandingan serta tolak ukur bagi Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas kedepan nantinya.

Akhir kata dalam pembuatan Laporan ini, kami telah berupaya mengerjakan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Atas masukannya, diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stabilitas keamanan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2020 secara umum dapat dikatakan kondusif walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 berjalan dengan sukses dan lancar dengan melaksanakan protocol kesehatan secara ketat dalam setiap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, persentase partisipasi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebesar 68,3%, sedangkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 68,2%. Turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden disebabkan karena masyarakat takut datang ke TPS-TPS karena Pandemi Covid-19. Konflik yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2020 dapat difasilitasi penyelesaiannya, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan maupun pemerintahan. Demikian juga halnya dalam memperkuat ketahanan nasional yaitu dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan telah dilaksanakan peringatan hari bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa. Hal tersebut merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “Yang Mantap” berlandaskan Iman dan Taqwa memerlukan kerja sama yang baik dan dinamis dari semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terbesar.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dan kegiatan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 sebesar Rp. 5.699.724.158,- (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.351.911.750,-(Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 3.347.812.408,-(Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS DAN WEWENANG.....	2
	C. SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL.....	7
	D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	8
	E. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
	A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	12
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	15
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
	B. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	20
	C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA.....	22
	D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN.....	48
	E. REALISASI ANGGARAN.....	51
BAB IV	: PENUTUP.....	51
	A. KESIMPULAN.....	53
	B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	8
Tabel 2.1	IKU Kesbangpol.....	16
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian.....	19
Tabel 3.2	Hasil pengukuran kinerja.....	20
Tabel 3.3	Capaian kinerja sasaran strategis 1.....	23
Tabel 3.4	Capaian kinerja sasaran strategis 2.....	28
Tabel 3.5	Capaian kinerja sasaran strategis 3.....	31
Tabel 3.6	Realisasi fisik dan keuangan Tahun 2020.....	49
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	6
Gambar 3.1	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	24
Gambar 3.2	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	24
Gambar 3.3	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	25
Gambar 3.4	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	25
Gambar 3.5	Peringatan Hari Bela Negara.....	26
Gambar 3.6	Peringatan Hari Bela Negara.....	26
Gambar 3.7	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Payakumbuh	33
Gambar 3.8	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Payakumbuh	33
Gambar 3.9	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kapur IX.....	34
Gambar 3.10	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kapur IX.....	34
Gambar 3.11	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	35
Gambar 3.12	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	35
Gambar 3.13	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Akabiluru.....	36
Gambar 3.14	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Akabiluru.....	36
Gambar 3.15	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gunuang Omeh.....	37
Gambar 3.16	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gunuang Omeh.....	37
Gambar 3.17	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Harau.....	38
Gambar 3.18	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Harau.....	38
Gambar 3.19	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Pangkalan.....	39
Gambar 3.20	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Pangkalan.....	39
Gambar 3.21	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Guguak.....	40
Gambar 3.22	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Bukik Barisan.....	40
Gambar 3.23	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Bukik Barisan.....	41
Gambar 3.24	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.....	41
Gambar 3.25	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.....	42
Gambar 3.26	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Luak.....	42

Gambar 3.27	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Luak.....	43
Gambar 3.28	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Mungka.....	43
Gambar 3.29	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Mungka.....	43
Gambar 3.30	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Suliki.....	44
Gambar 3.31	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Suliki.....	44
Gambar 3.32	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 untuk Aparatur Sipil Negara di Hotel Mangkuto Payakumbuh.....	45
Gambar 3.33	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 untuk Aparatur Sipil Negara di Hotel Mangkuto Payakumbuh.....	45
Gambar 3.34	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 untuk Organisasi Masyarakat di Hotel Mangkuto Payakumbuh.....	46
Gambar 3.34	Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 untuk Organisasi Masyarakat di Hotel Mangkuto Payakumbuh.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi//Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sedangkan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten).

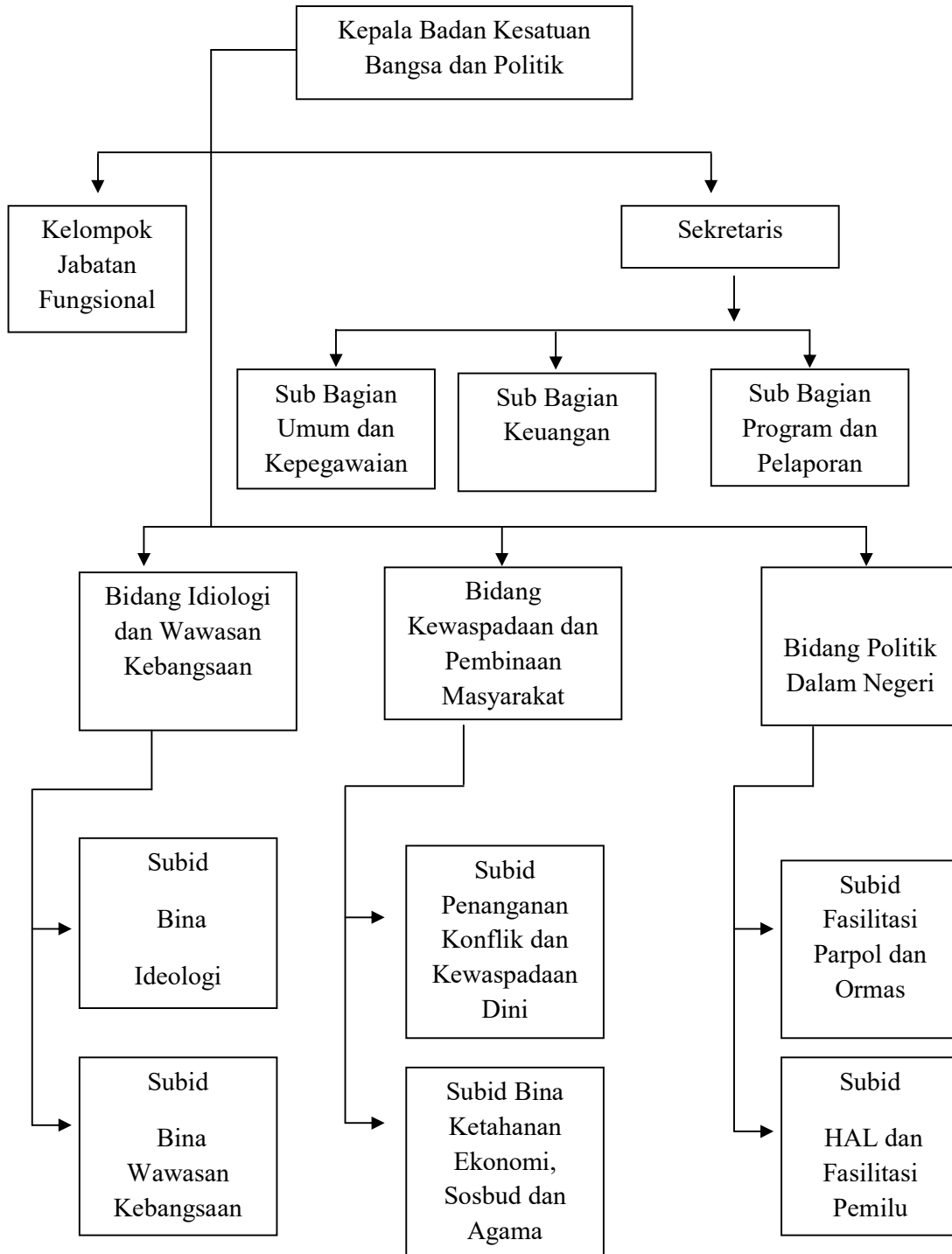
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2020 menunjukkan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa berjumlah 30 (tiga puluh) orang, 24 (dua puluh empat) PNS, 1 (satu) PTT dan 5 (lima) THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 6 (enam) orang,
- e. Staf sebanyak 13 (tiga belas) orang,
- f. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 (satu) orang, dan
- g. Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	4	2	-	7
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	1	4	-	-	5
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	4	1	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	1	3	2	-	6
	Jumlah	4	15	5	-	24

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	4	1	2	-	-	7
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	-	4	-	1	-	-	5
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	3		2	-	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	4	-	1	1	-	6
6.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	-	-	1
7.	Tenaga Harian Lepas	-	1	-	4	-	-	5
	Jumlah	1	16	1	11	1		30

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota belum terukur secara jelas.
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran.
- d. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relative masih terbatas, dan adanya tumpang tindih program/kegiatan dengan OPD lainnya.
- e. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.

6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 7. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak social politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.
 3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 4. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 5. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan diri.
 6. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
 2. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan Orkemas.
 4. Belum terhimpun seluruh data Orkemas dan Partai Politik, di Kabupaten Lima Puluh Kota
 5. Kurangnya kesadaran pengurus Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan

keuangan Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Belum maksimal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap:
 - a. Pelaksanaan Pemilu (Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah)
 - b. Situasi Politik lainnya (Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dan DPRD, unjuk rasa).
 - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota, visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa** . Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1, yang diwujudkan dalam sejumlah program dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping untuk menunjang misi 1, rencana strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4, yang diwujudkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
 - b. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis.
 - d. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
 - b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peringatan Peristiwa Bela Negara di 7 Titik peringatan.
2. Menyelenggarakan forum-forum komunikasi di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyelenggarakan penyuluhan politik kepada masyarakat.
4. Melakukan monitoring perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian (penempatan dan pengembangan karir aparatur).
6. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis kinerja.
7. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
8. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun strategi yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperingati Peristiwa Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi.
4. Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
5. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur.
6. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif , efisien dan akuntabel.
7. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur.
8. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kompetensi aparatur.
10. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 46/BKBP-LK/2018 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021

Tabel 2.1
IKU Kesbangpol

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	$\frac{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati}}{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang harus diperingati}} \times 100 \%$	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun n}}{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun n}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian	Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	$\frac{\text{Jumlah pengguna tahun n} - \text{Jumlah Pengguna tahun n-1}}{\text{Jumlah pengguna tahun n-1}} \times 100 \%$	BNN Kota Payakumbuh, Kepolisian	
3.	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan PemiluKada	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pileg}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pileg}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pilpres}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilpres}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan PemiluKada}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT PemiluKada}} \times 100 \%$	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, berikut ini disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran

2020. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	70%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	75.305.000,-
2.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	331.813.500,-
3.	Pendidikan Politik Masyarakat	1.122.390.373,-
	TOTAL	1.529.568.873,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	100%	105,2%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	70%	68,2%	97,43%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					101,44%	Sangat Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalahh 101,44% dengan predikat sangat tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/14/INSP-LK/LHE/EV/V/2020 tanggal 13 Mei Tahun 2020, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Akan ditindaklanjuti reuiu terhadap dokumen renstra secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM, dan tujuan yang ditetapkan telah disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator) .
2. Akan ditetapkan target kinerja dengan baik serta program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil/program/hasil kegiatan.
3. Akan dimonitor pencapaian rencana aksi secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
4. Akan memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi akan dilakukan secara bulanan/triwulan/semester dan pengukuran kinerja atas rencana aksi akan digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
2. Pengukuran kinerja akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Akan memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dan akan dilaksanakan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV dan hasil pengukurannya akan digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
4. IKU akan direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja akan memuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan sepenuhnya dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/ kegiatan organisasi dan untuk peningkatan kinerja secara maksimal.

D. Evaluasi Internal

1. Akan dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Akan dilaksanakan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja, sehingga memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.
3. Akan ditindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Akan lebih ditingkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, dan akan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

- 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat**

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional		7 titik	7 titik	80%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Makin mudahnya rasa berbangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral Bangsa.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2020 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di 3 (tiga) titik Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Syuhada (BNPK) di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang tanggal 10 Januari 1949, yang

diperingati di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2020.

Gambar 3.1

Peringatan peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam



Gambar 3.2

Peringatan peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam



- b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuah Batua (Peristiwa Situjuah) tanggal 15 Januari 1949, yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tanggal 15 Januari 2020.

Gambar 3.3

Peringatan Peristiwa Situjuah



Gambar 3.4

Peringatan Peristiwa Situjuah



- c. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi Tanggal 19 Desember 1948, yang dilaksanakan di Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh pada tanggal 19 Desember 2020 sebagai Peringatan Hari Bela Negara.

Gambar 3.5
Peringatan Hari Bela Negara

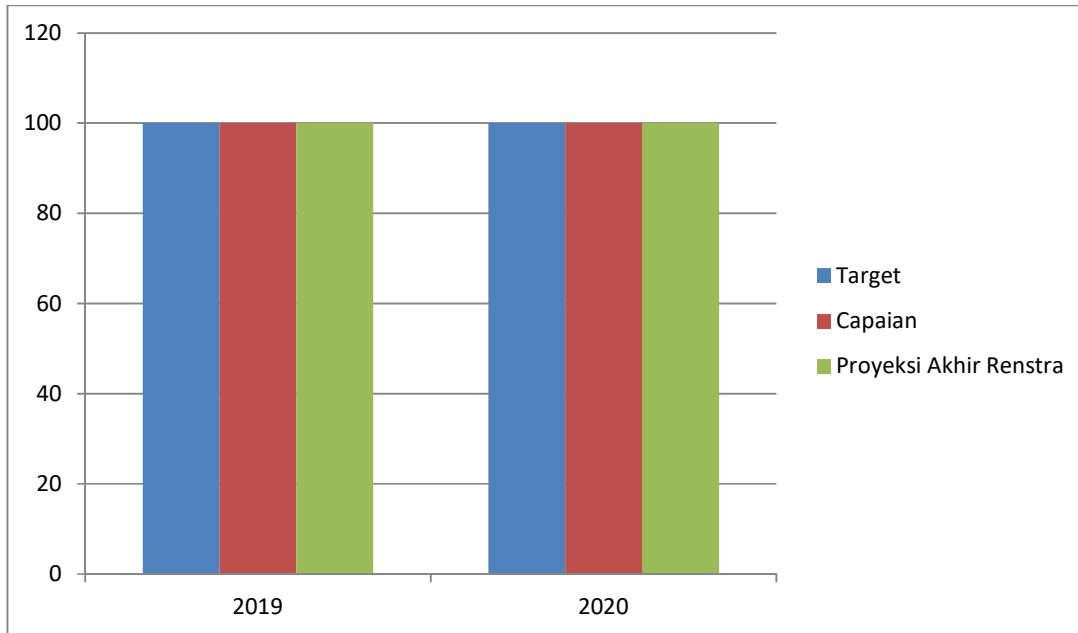


Gambar 3.6
Peringatan Hari Bela Negara



1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat adalah sebagai berikut:



Pada Tahun 2019 target persentase pelaksanaan peringatan hari besar Nasional 100% dengan realisasi 100%. Sedangkan pada Tahun 2020 target 100% terealisasi 100%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakan di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan KesbangPol Provinsi Sumatera Barat, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada didaerah dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.
- Program yang mendukung sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat adalah Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp. 95.018.500,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota		3 kali	1 kali	51%	100%	95%	100%	95%	100%	

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

2.1. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota

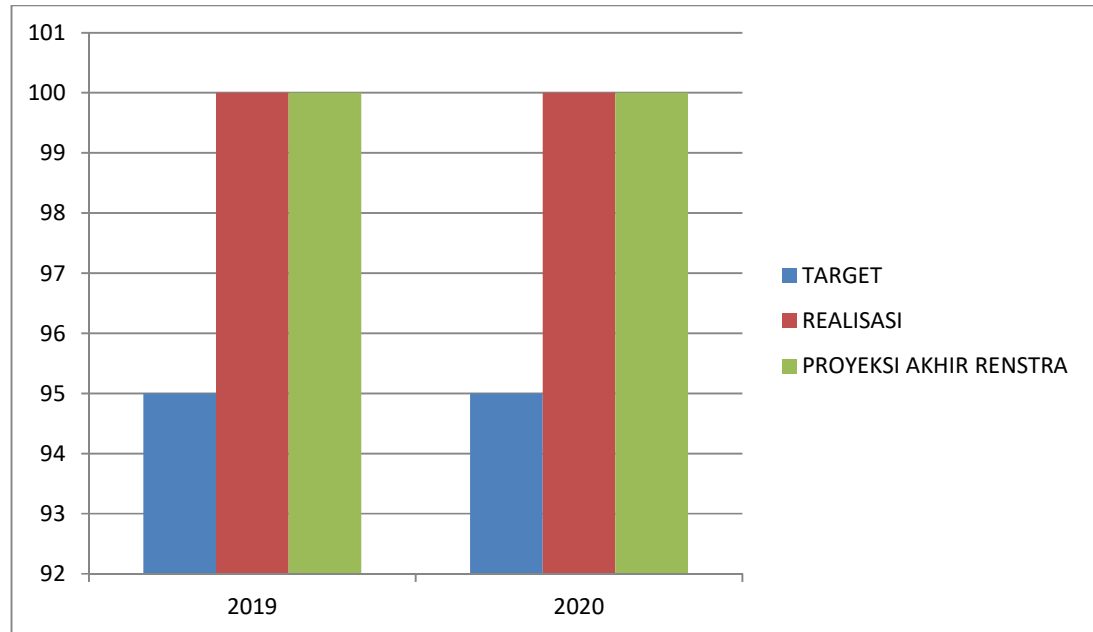
Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sebagai berikut :

- a. Demo Masyarakat Nagari Persiapan Ulu Aia tanggal 10 Februari 2020 tentang pemekaran Nagari Ulu Aia ke DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari) bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Demo Mahasiswa Politan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Indonesia Pancasila tanggal 16 Juli 2020 ke Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Audiensi Ormas Formula ke DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 27 September 2020 terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Indonesia Pancasila, telah difasiltasi penyelesaiannya oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Demo BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Payakumbuh-Lima Puluh Kota terkait Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 8 Oktober 2020, telah difasilitasi

penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah sebagai berikut:



Capaian Sasaran strategis Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan indikator kinerja persentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2019 target sebesar 95% dan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2020 target 95% dan realisasi 100%, hal ini disebabkan oleh karena:

- Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berhasil dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparaturn pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

2.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

2.1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.
- Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
a.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Rp. 75.365.000,-
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
a.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp. 122.885.000,-
b.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Rp. 113.910.000,-

3. Sasaran Stategis 3 : Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase Partisipasi		-	-	-	-	75%	80,90%	70%	68,2%	

Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya Pemerintahan.

Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan Pemilu. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, telah dilaksanakan Penyuluhan Undang-Undang Pilkada yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (kali) Penyuluhan untuk Organisasi Kemasyarakatan dan 1 (kali) untuk Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar 3.7
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Payakumbuh



Gambar 3.8
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Payakumbuh



Gambar 3.9
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kapur IX



Gambar 3.10
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kapur IX



Gambar 3.11
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Lareh Sago Halaban



Gambar 3.12
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Lareh Sago Halaban



Gambar 3.13
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Akabiluru



Gambar 3.14
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Akabiluru



Gambar 3.15
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Gunuang Omeh



Gambar 3.16
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Gunuang Omeh



Gambar 3.17
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Harau



Gambar 3.18
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Harau



Gambar 3.19
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Pangkalan



Gambar 3.20
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Pangkalan



Gambar 3.21
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Guguak



Gambar 3.22
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Bukit Barisan



Gambar 3.23
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Bukit Barisan



Gambar 3.24
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari



Gambar 3.25
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari



Gambar 3.26
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Luak



Gambar 3.27
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Luak



Gambar 3.28
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Mungka



Gambar 3.29
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Mungka



Gambar 3.30
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Suliki



Gambar 3.31
Sosialisasi pilkada tahun 2020 di Kecamatan Suliki



Gambar 3.32
Sosialisasi pilkada tahun 2020 untuk Aparatur Sipil Negara di Hotel Mangkuto Payakumbuh



Gambar 3.33
Sosialisasi pilkada tahun 2020 untuk Aparatur Sipil Negara di Hotel Mangkuto Payakumbuh



Gambar 3.34
Sosialisasi pilkada tahun 2020 untuk Organisasi Masyarakat di Hotel Mangkuto

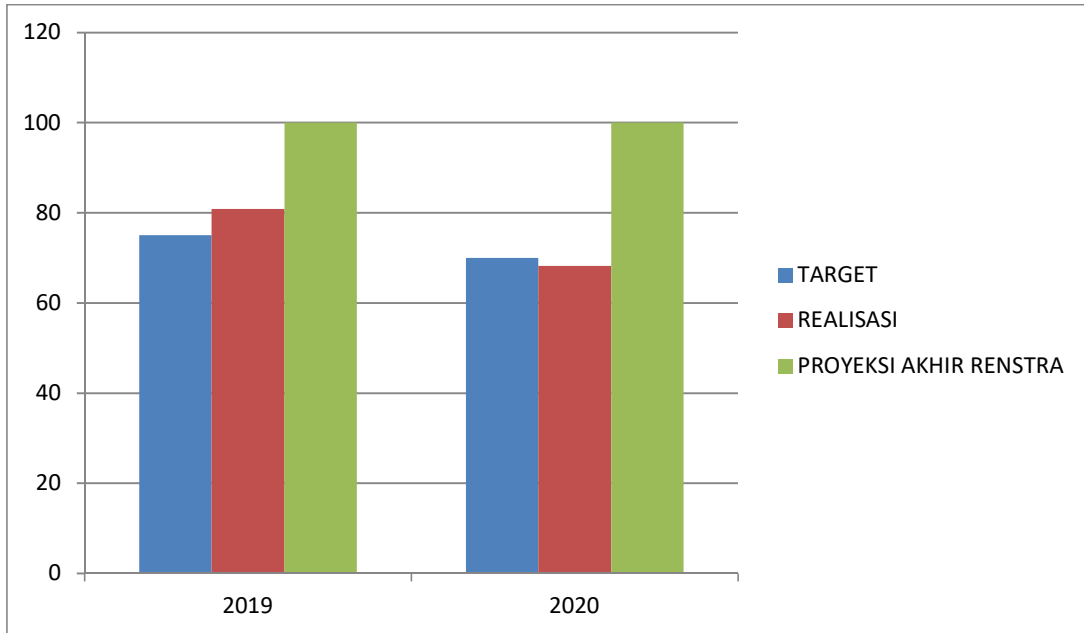


Gambar 3.35
Sosialisasi pilkada tahun 2020 untuk Organisasi Masyarakat di Hotel Mangkuto



3.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:



Capaian strategis Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada pada tahun 2019 dengan target 75% tercapai 80,90%, sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan 70% dengan realisasi 68,2%.

- Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Serentak Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - Terbatasnya peserta sosialisasi dan penyuluhan tentang pemilukada yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, dimana pada saat penyuluhan dilakukan dengan protocol kesehatan yang ketat.
 - Meningkatnya jumlah kasus Corona menyebabkan masyarakat takut untuk datang ke tempat pemungutan suara.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga

dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

3.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

3.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada didaerah dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.
- Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1.	Program Pendidikan Politik Politik Masyarakat	
a.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Rp. 276.336.873,-
b.	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Rp. 897.168.700,-
c.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 846.053.500,-

D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020, jumlah anggaran belanja langsung adalah Rp. 3.347.812.408, dengan realisasi keuangan Rp. 2.819.559.784 (84,22 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan tiap programnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Ket
			Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik (%)	
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	410.534.235,-	395.050.935,-	96,23%	100%	Efisien
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	2.998.000,-	99,93%	100%	efisien
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	19.320.000,-	14.469,295,-	74,89%	100%	efisien
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.430.000,-	171.765.000,-	97,91%	100%	efisien
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.544.0000,-	28.920,350,-	97,89%	100%	efisien
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.751.500 ,-	24.751.500,-	100%	100%	Kurang efisien
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.935.000,-	16.893.000,-	84,74%	100%	efisien
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.896.000,-	4.950.000,-	83,96%	100%	efisien
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	18.000.000,-	100%	100%	Kurang efisien
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000,-	18.705.000,-	89,07%	100%	efisien
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93.657.735 ,-	93.598.800,-	99,94%	100%	efisien
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459.100.600,-	448.104,949,-	97,60%	100%	Efisien
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	268.125.000,-	268.125.000,-	100%	100%	Kurang efisien
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.000.000,-	65.900.000,-	94,14%	100%	efisien
3.	Pengadaan Mebeleur	25.312.000,-	25.250.000,-	99,76%	100%	efisien

4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	100%	100%	Kurang efisien
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73.163.600,-	67.009.949,-	91,69%	100%	efisien
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.500.000,-	6.820.000,-	90,93%	100%	efisien

III.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.285.000,-	16.246.000,-	99,76%	100%	efisien
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.285.000,-	16.246.000,-	99,76%	100%	efisien

IV.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	110.520.000,-	86.575.000,-	78,33%	100%	efisien
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	75.365.000,-	53.335.000,-	70,77%	100%	efisien
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	1.000.000,-	1.000.000,-	100%	100%	efisien
3.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	34.155.000,-	32.240.000,-	94,39%	100%	efisien

V.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	331.813.500,-	298.033.500,-	89,82%	100%	efisien
1.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	122.885.000,-	114.085.000,-	92,84%	100%	efisien
2.	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	95.018.500,-	87.088.500,-	91,65%	100%	efisien
3.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	113.910.000,-	96.860.000,-	85,03%	100%	efisien
VI.	Pendidikan Politik Masyarakat	2.019.559.073,-	1.575.549.400,-	78,01%	100%	efisien
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	276.336.873,-	219.540.400,-	79,45%	100%	efisien
2.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	897.168.700,-	578.095.500,-	64,44%	100%	efisien
3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	846.053.500,-	777.915.500,-	91,95%	100%	efisien
	JUMLAH	3.347.812.408,-	2.819.559.784-	84,22%	100%	efisien

E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Ket
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.929.235,-	410.534.235,-	395.050.935,-	96,23%	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	2.998.000,-	99,93%	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	31.808.000,-	19.320.000,-	14.469,295,-	74,89%	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	226.655.000,-	175.430.000,-	171.765.000,-	97,91%	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.200.000,-	29.544.000,-	28.920,350,-	97,89%	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.200.000,-	24.751.500,-	24.751.500,-	100%	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.840.000,-	19.935.000,-	16.893.000,-	84,74%	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.800.000,-	5.896.000,-	4.950.000,-	83,96%	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	18.000.000,-	18.000.000,-	100%	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000,-	21.000.000,-	18.705.000,-	89,07%	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	156.426.000,-	93.657.735,-	93.598.800,-	99,94%	
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	386.596.600,-	459.100.600,-	448.104,949,-	97,60%	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	270.000.000,-	268.125.000,-	268.125.000,-	100%	
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	40.000.000,-	70.000.000,-	65.900.000,-	94,14%	
3.	Pengadaan Mebeleur	26.400.000,-	25.312.000,-	25.250.000,-	99,76%	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000,-	15.000.000,-	100%	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67.148.600,-	73.163.600,-	67.009.949,-	91,69%	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,-	7.500.000,-	6.820.000,-	90,93%	

III.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.642.731,-	16.246.000,-	99,76%	100%	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.642.731,-	16.246.000,-	99,76%	100%	

IV.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	270.934.000,-	110.520.000,-	86.575.000,-	78,33%	
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	95.726.000,-	75.365.000,-	53.335.000,-	70,77%	
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	46.434.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100%	
3.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	54.900.000,-	0	0	0	
4.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	73.874.000,-	34.155.000,-	32.240.000,-	94,39%	

V.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	747.866.000,-	331.813.500,-	298.033.500,-	89,82%	
1.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	357.599.000,-	122.885.000,-	114.085.000,-	92,84%	
2.	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	84.727.000,-	0	0	0	
3.	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	162.840.000,-	95.018.500,-	87.088.500,-	91,65%	
4.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	142.700.000,-	113.910.000,-	96.860.000,-	85,03%	
VI.	Pendidikan Politik Masyarakat	2.479.587.500,-	2.019.559.073,-	1.575.549.400,-	78,01%	
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	404.439.500,-	276.336.873,-	219.540.400,-	79,45%	
2.	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	6.581.700,-	0,-	0	0	
3.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	1.031.988.500,-	113.838.500,-	107.740.000,-	94,64%	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.036.578.50,-	100.806.000,-	89.589.000,-	88,87%	
	JUMLAH	4.550.239.831,-	2.252.023.560,-	2.036.630.453,-	90,43%	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari Instansi Vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan lain-lain maupun dukungan dari instansi lainnya (Badan, Setwan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Nagari).

Mengingat dana yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sangat terbatas, walaupun oleh Kementerian Dalam Negeri sudah harus dilaksanakan oleh daerah, tapi sampai saat ini kegiatan tersebut belum bias dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlunya staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari staf, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Perlunya tambahan kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- c. Perlunya dukungan dana yang layak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana, terutama kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Perlunya tambahan personil yang mempunyai keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001